

RINGKASAN

Muhamad Pasya Fitra : Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak
Nim: 247410101016 Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres
Aceh Tengah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional Indonesia sebagai negara hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam insiden tragis di Kampung Sukajadi yang hingga kini belum terungkap akibat minimnya alat bukti dan kendala geografis. Kegagalan identifikasi pelaku di area terpencil tersebut tidak hanya mengindikasikan lemahnya sistem deteksi dini serta respons taktis aparat, tetapi juga mencerminkan rendahnya budaya hukum masyarakat dalam berpartisipasi pada proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap variabel penegakan hukum di Polres Aceh Tengah guna memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) dan memastikan wilayah perkebunan tidak menjadi lokus kejahatan yang aman bagi pelaku kriminal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah, serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Polres Aceh Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui pengumpulan data primer dan sekunder guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelidikan dan penyidikan *curas* di Polres Aceh Tengah secara normatif telah sesuai dengan KUHAP dan UU Polri, namun implementasinya terhambat oleh kesenjangan (*discrepancy*) antara regulasi dan realitas lapangan akibat keterbatasan sarana serta kendala geografis perkebunan yang ekstrem. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Aceh Tengah dilaksanakan secara sistematis melalui integrasi antara ketelitian teknis penyidik (seperti strategi *Triangle Crime Scene* dan penetapan DPO) dengan partisipasi aktif budaya hukum masyarakat, guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum yang berorientasi pada kebenaran materiil dan keadilan bagi korban sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.

Saran Kepada Pemerintah Daerah dan Polres Aceh Tengah disarankan untuk mengintegrasikan Politik Kriminal Non-Penal melalui penguatan peran *Reje* (Kepala Desa) dan Tokoh Adat Gayo dalam melakukan pengawasan terhadap pendatang atau buruh petik kopi musiman.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pencurian Dengan Kekerasan, Kepolisian, Polres*

SUMMARY

Muhamad Pasya Fitra : **Juridical Study on Law Enforcement of Robbery with Violence Crimes at Polres Aceh Tengah**
Nim: 247410101016

The law enforcement against the crime of theft with violence (curas) is a manifestation of Indonesia's constitutional responsibility as a Rechtsstaat (state governed by the rule of law) to guarantee the protection of human rights and dignity. This is reflected in the tragic incident in Sukajadi Village, which remains unsolved due to a lack of evidence and geographical constraints. The failure to identify the perpetrator in such a remote area indicates not only a weakness in the early detection system and tactical response of the authorities but also reflects a low legal culture among the community regarding participation in the investigation process. Therefore, a comprehensive evaluation of law enforcement variables at the Central Aceh Resort Police (Polres Aceh Tengah) is necessary to restore public trust and ensure that plantation areas do not become safe havens for criminals.

This research aims to examine the conformity of investigation and prosecution practices for robbery with violence crimes at Polres Aceh Tengah, as well as the efforts by Polres Aceh Tengah to tackle such crimes.

The research method employed is juridical empirical legal research, using a statutory and case approach, through the collection of primary and secondary data to obtain a comprehensive picture of law enforcement implementation in the field.

The research results show that the investigation and prosecution of robbery at the Central Aceh Police are normatively in accordance with the Criminal Procedure Code and the National Police Law. However, its implementation is hampered by a discrepancy between regulations and field reality due to limited facilities and the extreme geographical constraints of plantations. Law enforcement efforts against the crime of theft with violence at the Central Aceh Resort Police (Polres Aceh Tengah) are implemented systematically through the integration of investigators' technical precision (such as the Triangle Crime Scene strategy and the issuance of Wanted Lists/DPO) and the active participation of the community's legal culture, in order to achieve effective law enforcement oriented toward material truth and justice for victims in accordance with the prevailing criminal procedural law.

Recommendations: The Local Government and the Central Aceh Resort Police (Polres Aceh Tengah) are advised to integrate Non-Penal Criminal Policy by strengthening the roles of the Reje (Village Head) and Gayo Traditional Leaders in monitoring newcomers or seasonal coffee harvesters.

Keywords: Law Enforcement, Robbery with Violence, Police, Polres